



LKJIP TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Durian Dusun Sarimerta Desa Negari telp (0366) 24337
SEMARAPURA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sistem manajemen menjadi agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 ini menggambarkan secara umum pencapaian saran strategis, melalui pelaksanaan program yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2025 dan Penetapan Kinerja tahun 2025, disamping itu sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Tugas, fungsi, kewenangan, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Uraian lebih rinci sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1.2. Gambaran Umum

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program pada dokumen RPD 2024-2026, serta telaahan Rencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Provinsi Bali. Saat ini, RPD Kabupaten Klungkung akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2023-2025. Arah Kebijakan pada periode ini adalah lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini diharapkan akan terwujud masyarakat Klungkung yang sejahtera, adil, demokratis, dan unggul (SADU).

Identifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin, dan berintegritas;
- b. Kurangnya kerja sama dalam lingkup SKPD dan lintas sektoral sehingga mempengaruhi keberhasilan pembangunan pemberdayaan masyarakat;
- c. Belum siapnya mental masyarakat untuk berubah;
- d. Masih lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
- e. Belum efektifnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa Pengendalian penduduk dan keluarga berencana .

1.2.1 Tugas dan fungsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2022 Kabupaten Klungkung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas, fungsi sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

Adapun kedudukan, tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2022 Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan Kebijakan tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 **Struktur organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam mendukung kebijakan bupati mengacu pada

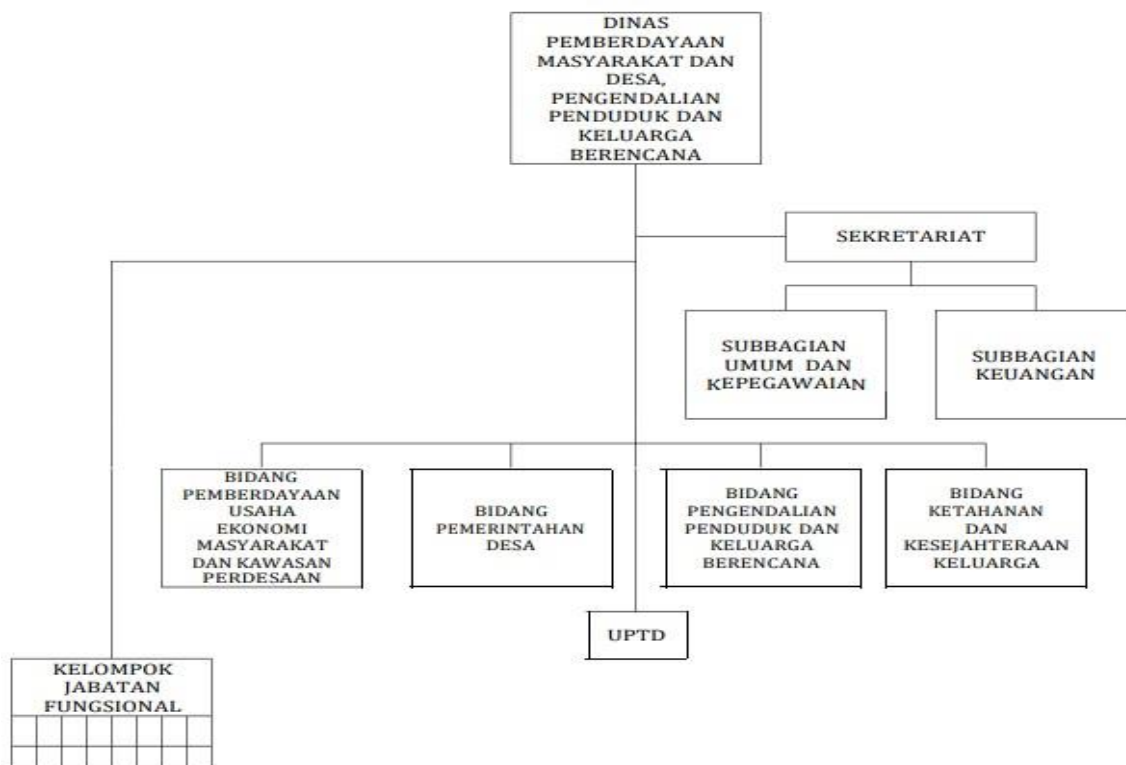
Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - a. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, tatausaha, reformasi birokrasi, manajemen sumber daya aparatur serta penatalaksanaan hubungan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan kawasan Perdesaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama desa.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, asset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB.
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2.1 Struktur Organisasi DPMDPPKB Kab. Klungkung



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1.2.3 SDM OPD DPMDPPKB

Jumlah dan kompetensi SDM pada setiap jenjang pada DPMDPPKB sampai dengan tahun 2025 sebanyak 28 orang PNS dan 69 orang PPPK yang tersebar di masing-masing bidang. Jumlah keseluruhan tenaga ASN yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 97 orang dengan uraian sebagai berikut:

. Tabel 1.2.3.1. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan, Eselon dan Pendidikan

NO	SDM OPD					
1	2	3	4	5	6	7
	GOLONGAN	JUMLAH	ESELON	JUMLAH	PENDIDIKAN	JUMLAH
	IV/c	1	II/b	1	S.2	5
	IV/b	-	III/b	3	S.1	19
	IV/a	3	III/a	-	D III	1
	III/d	14	IV/a	2	SMA	3
	III/c	3			SMK	-
	III/b	0			SMP	-
	III/a	2				
	II/b	-				
	II/c	-				
	II/d	1				

Sumber :DPMDPPKB Tahun 2025

. Tabel 1.2.3.2. Jumlah Pegawai PPPK Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	SDM OPD					
1	2	3	4	5	6	7
	PPPK Penuh Waktu			PPPK Paruh Waktu		
	Golongan	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Pendidikan	Jumlah
	IX	S1	47	IX	S1	13
	V	SMA	5	V	SMA	4

Sumber :DPMDPPKB Tahun 2025

Berdasarkan data diatas SDM DPMDPPKB dilihat dari golongannya III/d yang paling banyak yaitu 14 orang, eselon III/b sebanyak 3 orang dan pendidikan S1 sebanyak 19 orang. Dan dilihat dari jumlah pegawai PPPK Penuh waktu golongan IX dengan pendidikan S1 paling banyak yaitu 47 orang.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, Struktur organisasi dan sistematika penyusunan LKJIP, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjabarkan tentang muatan Rencana Strategis untuk periode 2024 – 2026 dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang capaian kinerja, selama tahun 2025 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis SKPD

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Klungkung

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung seperti yang tertuang pada RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026, telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KLUNGKUNG YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKEADILAN DALAM WILAYAH KLUNGKUNG YANG TERTIB, RAMAH, INDAH, DAMAI, AMAN, TENTRAM DAN UNIK BERLANDASKAN TRI HITAKARANA”**.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan “ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan” , melalui upaya pengembangan usaha pertanian, perkebunan termasuk penyediaan infrastruktur irigasi, perikanan, peternakan, kelautan, industri, perdagangan/pasar, koperasi, pariwisata, pemberdayaan masyarakat/gender/pengentasan kemiskinan, investasi swasta/penanaman modal, ketenagakerjaan/kependudukan, pelayanan umum aparatur, baik teknis maupun administratif.
 2. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), melalui pembinaan dan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
 3. Mewujudkan keluaran (output) mutu pendidikan terutama “menyukkseskan wajib belajar 12 tahun, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”; termasuk mengembangkan kreativitas generasi muda dan aktivitas olahraga; melalui peningkatan SDM pendidik, pelatih, tutor dan sarana/prasarana kependidikan, kegenerasimudaan dan keolahragaan.
- Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dengan menjaga

kepastian hukum dan stabilitas politik.

4. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di berbagai lini (informasi, materi, energi), dan penelitian, agar mampu berdaya saing dalam menghadapi pasar global.
5. Mewujudkan pelestarian, penggalian dan pengembangan kreativitas seni dan budaya asli Klungkung, termasuk “Semarapura Cultural Heritage” dalam kapasitas Semarapura sebagai pusat kerajaan Klungkung pada zamannya, berlandaskan agama Hindu; penanaman nilai-nilai budi pekerti, moral/etika, disiplin kerja, transparansi, demokrasi dan etos kerja, pada tataran aparatur pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat.
6. Mewujudkan penegakan dan penjunjungan tinggi supremasi Hukum dan HAM diatas kekuasaan, penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan ikut membantu kewenangan Pemerintah Pusat di bidang keamanan tertentu, penciptaan iklim demokrasi, pemberian kebebasan pers yang tidak bertentangan dengan kode etik, menciptakan iklim politik yang dinamis dan kondusif; serta pemberian suluhan, bantuan dan konsultasi hukum bagi pranata maupun individu yang membutuhkan.
7. Mewujudkan penataan ruang Wilayah/kawasan/lingkungan –Induk, Detail, Tapak-, untuk mencapai keserasian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan fungsi ruang berdasarkan konsep Tri Angga, Tri Mandala dan Sanga Mandala.
8. Mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertataan lingkungan pemukiman dan lingkungan fisik lainnya, termasuk aksesibilitas wilayah, melalui penyediaan sarana/prasarana kebersihan, pertamanan, sarana/prasarana umum, sarana/prasarana perhubungan dan sarana/prasarana aparatur; penciptaan suasana lingkungan nir-fisik, berupa jaminan keamanan wilayah.
9. Mewujudkan keserasian hubungan umat manusia dengan lingkungannya melalui upaya ritualisasi umat beragama, pelestarian daya dukung lingkungan dan hidup biotic dan abiotic, melalui rehabilitasi, konservasi/suaka
10. Mewujudkan aktualisasi keserasian hubungan antar umat manusia /umat beragama, melalui upaya penanaman rasa kesatuan dan persatuan, wawasan kebangsaan sebagai implementasi spirit kebinekatunggalikaan, berlandaskan konsep Etika/Susila.
11. Mewujudkan aktualisasi dan pendalaman rasa batiniah hubungan antara umat beragama dengan Tuhan, melalui berbagai kegiatan keagamaan baik Tatwa maupun Ritual.

Dari sebelas misi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berada pada misi ke-2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.1
Visi dan Misi RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan dalam wilayah Klungkung yang Tertib, Ramah, Indah, Damai, Aman, Tentram dan Unik berlandaskan Tri Hita Karana.	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), melalui pembinaan dan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Terkait 11 Misi RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 menjadi 4 tujuan yaitu:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata.
3. Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif.

Untuk mendukung tercapainya visi, misi serta tujuan Kabupaten Klungkung tersebut maka sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung mendukung tujuan ke-2 yaitu Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata.

Table 2.1.2.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi Kabupaten yang Mendukung	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan	Target				
			Awal	2024	2025	2026	Akhir
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), melalui pembinaan dan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Membangun pertumbuhan perekonomian yang merata	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,44	8,52	8,57	8,72	8,72
		Kontribusi lapangan usaha industry pengolahan terhadap PDRB (%)	9,95	9,81	9,92	9,99	9,99
		Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	9,18	12,15	12,16	12,17	12,17

Sumber data : Renstra DPMDPPKB Tahun 2024-2026

Sasaran adalah penjabaran lebih rinci dari tujuan yang spesifik, terukur, terjangkau, realistis dan dalam waktu tertentu yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 adalah:

Table 2.1.2.2
Sasaran dan Indikator Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana

sasaran	Indikator sasaran	Target				
		Awal	2024	2025	2026	Akhir
Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	66,65	70,5	73	75	75
Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Dengan Status Desa Mandiri	15	20	25	30	30

Sumber: Renstra DPMDPPKB Tahun 2024-2026

Dalam table diatas dapat kita lihat perkembangan sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam hal ini tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang mengukur kualitas keluarga melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan sesuai peraturan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam hal meningkatnya keberdayaan masyarakat yang mandiri, desa dalam hal ini terdapat beberapa kreteria disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

2.2 Indikator Kinerja Utama DPMDPPKB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya dipakai sebagai pedoman di dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama DPMDPPKB

Sasaran	Indikator sasaran	Penjelasan
Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022. iBangga merupakan indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang mengukur kualitas keluarga melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan
Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	Status desa mandiri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Sumber data : DPMDPPKB Kab. Klungkung Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat-pejabat di setiap instansi pemerintah. Penetapan kinerja sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja DPMDPPKB Kab. Klungkung Tahun 2025

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target
Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	73
Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	desa	53

Sumber data: Perjanjian Kinerja Perubahan DPMDPPKB Kab. Klungkung Tahun 2025

Tabel 2.3.2

Anggaran Program DPMDPPKB Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 8.109.680.168,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.847.565.896,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat	Rp. 1.725.844.558,00
4.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 133.761.740,00
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 973.067.768,00

6.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.978.089.678,00
----	--	----------------------

Sumber data: Perjanjian Kinerja Perubahan DPMDPPKB Kab. Klungkung Tahun 2025

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 2 indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu : Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Terwujudnya Kemandirian Desa. Dengan adanya 2 sasaran maka terdapat 2 indikator sasaran dan target. Terdapat juga 7 program beserta anggaran masing-masing program di perubahan tahun 2025. Pada sasaran target terdapat perbedaan dengan yang tercantum pada Renstra 2024-2026 karena hal ini berdasarkan pada penentuan target capaian realisasi sebelumnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN I : Terwujudnya Keluarga Berkualitas

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, 2 (dua) sasaran strategis organisasi selanjutnya diukur dengan instrumen ukur kinerja yang disebut indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja utama.

Tabel 3.1.1.1
Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2025
Terwujudnya Keluarga Berkualitas

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	73	76,8	105,2

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 73 terealisasi 76,8 dengan capaian sebesar 105,2 %. Yang menjadi indikator pengukuran iBangga ditunjukkan melalui dimensi ketentraman sebesar 90,3; kemandirian 75,8; dan kebahagiaan keluarga 64,3.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat perbandingan Tingkat Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1.2 Perbandingan Capaian Tingkat iBangga

CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA) 2024						
No	Kabupaten/Kota	iBangga	Propinsi	iBangga	Target Nasional	Capaian Nasional
1	Badung	82.2	ACEH	71.2	64.1	67.3
2	Bangli	75.9	SUMATERA UTARA	62.9		
3	Buleleng	66.7	SUMATERA BARAT	68.1		
4	Gianyar	82.3	RIAU	69.7		
5	Jembrana	77,9	JAMBI	69.2		
6	Karangasem	72.0	SUMATERA SELATAN	69.7		
7	Klungkung	76.8	BENGKULU	70.4		
8	Kota Denpasar	81.1	LAMPUNG	66.9		
9	Tabanan	75.6	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	73.0		
10			KEPULAUAN RIAU	75.6		
11			DKI JAKARTA	67.6		
12			JAWA BARAT	63.8		
13			JAWA TENGAH	71.5		
14			DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	76.4		
15			JAWA TIMUR	67.3		
16			BANTEN	64.8		
17			BALI	76.5		
18			NUSA TENGGARA BARAT	63.7		
19			NUSA TENGGARA TIMUR	58.6		
20			KALIMANTAN BARAT	65.0		
21			KALIMANTAN TENGAH	67.9		
22			KALIMANTAN SELATAN	68.9		
23			KALIMANTAN	73.6		

			TIMUR			
24			KALIMANTAN UTARA	69.8		
25			SULAWESI UTARA	67.2		
26			SULAWESI TENGAH	64.8		
27			SULAWESI SELATAN	66.1		
28			SULAWESI TENGGARA	67.1		
29			GORONTALO	64.8		
30			SULAWESI BARAT	64.9		
31			MALUKU	67.1		
32			MALUKU UTARA	63.4		
33			PAPUA	56.7		
34			PAPUA BARAT	59.9		
35			PAPUA SELATAN	50.9		

Sumber data: Hasil Pemutakhiran PK-25 BKKBN

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan status pembangunan keluarga Kabupaten Klungkung, khususnya diantara kabupaten lainnya termasuk kategori nilai iBangga tangguh (diatas 70) yaitu 76.8 setelah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana.

Faktor-faktor Pendukung :

1. Tingkat Kualitas Keluarga

Meningkatnya kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik untuk terwujudnya kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Hal ini sesuai dengan kriteria tangguh dari iBangga dengan kisaran nilai diatas 70.

Tabel 3.1.1.2 Tingkat Kualitas Keluarga

No	Kabupaten/Kota	Nilai iBangga	Dimensi		
			Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
1	Klungkung	76.8	90.3	75.8	64.3

Sumber data : Hasil Pemutakhiran PK-25 BKKBN

2. Pengguna Alat Kontrasepsi

Dalam hal ini adanya Pasangan Usia Subur berstatus kawin banyak menggunakan alat kontrasepsi untuk Menunda Kelahiran. Hal ini terlihat dari jumlah peserta KB aktif

Adapun jumlah peserta KB aktif tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.3 Jumlah Peserta KB Aktif dan PUS

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur
1	Nusa Penida	6276	9556
2	Banjarangkan	4177	6168
3	Klungkung	5647	9180
4	Dawan	3684	6059
	Total	19784	30963

Sumber data : New Siga 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan terjadi peningkatan beberapa indikator di bidang keluarga berencana seperti peningkatan jumlah akseptor aktif keluarga berencana sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.1.1.4 Jumlah Peserta KB Aktif Modern

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Metode Kontrasepsi Modern									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD/ AKD R	VASE K TOMI/ MOP	TUBE K TOMI/ MOW	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
1.	Nusa Penida	6276	3760	210	100	973	946	9	244	8	6250	26
2.	Banjarangkan	4177	984	575	320	176	1567	6	425	13	4066	111
3.	Klungkung	5647	1959	697	722	283	1518	10	365	3	5557	90
4.	Dawan	3684	1482	311	148	372	934	6	290	1	3544	140

J u m l a h	19784	8185	1793	1290	1804	4965	31	1324	25	19417	367
--------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------------	------------

Sumber data : New Siga 2025



Berdasarkan gambar di atas maka secara total terlihat peningkatan jumlah akseptor KB aktif. Tetapi dilihat per macam alat kontrasepsi terjadi pergeseran penggunaan. Penurunan jumlah pengguna alat kontrasepsi terjadi hampir di semua penggunaan alat kontrasepsi sedangkan trend peningkatan terjadi pada pengguna Tubektomi dan Suntikan.

3.1.2 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Capaian Kinerja tiga tahun terakhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.2.1 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	66,65	66,65	100%	70,5	65,67	93,14%	73	76.8	105,2

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Dilihat dari pencapaian kinerja 3 tahun (2023 sampai 2025) bahwa di tahun 2024 terjadi penurunan capaian iBangga dibandingkan tahun sebelumnya 66,65 (2023) ke 65,67 (2024) atau turun menjadi 93,14%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada indikator dimensi kebahagiaan. Penyebabnya karena rendahnya tingkat interaksi ayah dalam pola pengasuhan anak. Untuk terwujudnya keluarga berkualitas diukur melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga, target yang ingin dicapai adalah peningkatan. Untuk tahun 2025 nilai iBangga dengan target 73 realisasi 76.8 telah mencapai diatas target. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini tabel Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) :

**Tabel 3.1.2.2
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

Uraian	Tahun		
	2023	2024	2025
iBangga	66.65	65,67	76,8

Sumber : DPMDPPKB Tahun 2025

3.1.3 Capaian Kinerja Target Renstra

Tabel 3.1.3.1

Capaian Kinerja Renstra SKPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2025	Capaian
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	75	76,8	102,4 %

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Capaian realisasi kinerja pada indikator sasaran iBangga terhadap target akhir Renstra telah mencapai diatas target dengan capaian 102,4%. Sehingga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi Sasaran I Terwujudnya Keluarga Berkualitas

No	Kegiatan	Indikator sasaran/program/kegiatan/subkegiatan	Capaian Output (realisasi kinerja)	Capaian Input (capaian keuangan)	Indeks Efisiensi	Rencana Output (target kinerja)	Rencana Input (target keuangan)	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
I										
1	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	76.8	88.96	0.863	73	100	0.73	0.183	Efisien
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	unmeetneed (persen)	107	87.5	1.223	100	100	1	0.223	107
3	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta KB aktif (persen)	80	87.5	0.914	80	100	0.8	0.143	Efisien
4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (laporan)	1	69.58	0.014	1	100	0.01	0.437	Efisien
5	Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (data)	1	80	0.013	1	100	0.01	0.25	Efisien

6	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (laporan)	1	94.54	0.011	1	100	0.01	0.058	Efisien
7	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (dokumen)	1	91.41	0.011	1	100	0.01	0.093	Efisien
8	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	1	94.18	0.011	1	100	0.01	0.062	Efisien
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase PUS yang memperoleh konseling (persen)	39	80.75	0.483	40	100	0.4	0.207	Efisien
10	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase PUS yang memperoleh KIE (persen)	80	81.85	0.977	85	100	0.85	0.149	Efisien

11	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (laporan	1	99.53	0.010	1	100	0.01	0.005	Efisien
12	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	85.27	0.012	1	100	0.01	0.173	Efisien

		(laporan)								
13	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (dokumen)	1	99.95	0.010	1	100	0.01	0.001	Efisien
14	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya	1	81.23	0.012	1	100	0.01	0.231	Efisien

		Lokal yang dilaksanakan (dokumen)								
15	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (organisasi)	1	62.59	0.016	1	100	0.01	0.598	Efisien
16	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan (persen)	70	98.18	0.713	70	100	0.7	0.019	Efisien
17	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)	5	100	0.05	5	100	0.05	0	Efisien

18	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (organisasi)	1	100	0.01	1	100	0.01	0	Efisien
19	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	1	44.44	0.023	1	100	0.01	1.250	Efisien

		Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PL KB) (laporan)									
20	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan (persen	65	62.87	1.034	70	100	0.7	0.477	Efisien	
21	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	1	92.81	0.011	1	100	0.01	0.077	Efisien	
22	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (orang)	325	59.3	5.481	329	100	3.29	0.666	Efisien	

23	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 (laporan)	1	100	0.01	1	100	0.01	0	Efisien
24	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase penyuluh bersertifikat (persen)	60	96.53	0.622	60	100	0.6	0.036	Efisien
25	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (kampung KB)	5	96.53	0.052	5	100	0.05	0.036	Efisien

26	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	angka ASFR (anak)	35	93.09	0.376	35	100	0.35	0.074	Efisien
27	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	pelatihan penyuluh (persen)	55	85.29	0.645	60	100	0.6	0.075	Efisien
28	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (laporan)	1	96.45	0.010	1	100	0.01	0.037	Efisien
29	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	1	85.82	0.012	1	100	0.01	0.165	Efisien

		Sejahtera (PPKS (laporan))								
30	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)	10	80.76	0.124	10	100	0.1	0.238	Efisien
31	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (orang)	20	90.67	0.221	20	100	0.2	0.103	Efisien

32	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (laporan)	1	53.27	0.019	1	100	0.01	0.877	Efisien
33	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	140	74.7	1.874	140	100	1.4	0.339	Efisien

		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (kelompok)								
34	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase keluarga ikut bina keluarga balita (BKB) (persen)	70	100	0.7	70	100	0.7	0	Efisien
35	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)	1	100	0.01	1	100	0.01	0	Efisien

		iran, Baduta/Ba lita) (laporan								
36	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan	1	100	0.01	1	100	0.01	0	Efisien

Sumber data: Sirenbangda-CIK Perubahan Desember 2025

3.1.5 Realisasi Anggaran Terwujudnya Keluarga Berkualitas

No	Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	133,761,740.00	117,035,349.00	16,726,391.00	87,50	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	133,761,740.00	117,035,349.00	16,726,391.00	87,50	

		Kabupaten/Kota					
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	32,025,000.00	22,281,468.00	9,743,532.00	69,58	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00	80.00	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	71.400.000,00	67.500.000,00	3.900.000,00	94.54	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24,480,000.00	22,376,049.00	2,103,951.00	91.41	
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1,356,740.00	1,277,832.00	78,908.00	94.18	
2		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	973,067,768.00	803,250,927.00	169,816,841.00	82.55	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	435,196,768.00	372,533,214.00	62,663,554.00	85.60	

		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	147,000,000.00	146,314,563.00	685,437.00	99.53	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	96,200,000.00	82,030,000.00	14,170,000.00	85.27	
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30,600,000.00	30,586,883.00	13,117.00	99.96	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	67,512,768.00	54,841,768.00	12,671,000.00	81.23	
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	93,884,000.00	58,760,000.00	35,124,000.00	62.59	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	247,700,000.00	243,200,000.00	4,500,000.00	98.18	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	100,00	

		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	8,100,000.00	3,600,000.00	4,500,000.00	44.44	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	275,051,000.00	172,922,713.00	102,128,287.00	62.87	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4,170,000.00	3,870,000.00	300,000.00	92.81	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250,181,000.00	148,352,713.00	101,828,287.00	59.30	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15,120,000.00	14,595,000.00	525,000.00	96.53	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	15,120,000.00	14,595,000.00	525,000.00	96.53	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,978,089,678.00	1,841,468,847.00	136,620,831.00	90.03	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	928,689,678.00	792,068,847.00	136,620,831.00	85.29	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	256,202,000.00	247,112,884.00	9,089,116.00	96.45	
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	21,440,000.00	18,400,000.00	3,040,000.00	85.82	

		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000.00	104,983,800.00	25,016,200.00	80.76	
		Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	212,924,778.00	193,068,024.00	19,856,754.00	90.67	
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	7,800,000.00	4,155,000.00	3,645,000.00	53.27	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	300,322,900.00	224,349,139.00	75,973,761.00	74.70	

		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.049.400.000,00	1.049.400.000,00	0,00	100,00	
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	477.000.000,00	477.000.000,00	0,00	100,00	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	572.400.000,00	572.400.000,00	0,00	100,00	

Sumber data: Sirebangda-CIK Perubahan Desember 2025

Pada bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ada program-program yang mengalami permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi inputnya dibawah 75 % yaitu:

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 32.025.000,00 terealisasi sebesar Rp 22.281.468,00 sebesar 69,58 % dengan indikator sub kegiatan Jumlah Laporan

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga (laporan) target sebesar 1 laporan dan terealisasi 1 laporan capaian 100%. Capaian keuangan kurang dari 75% dikarenakan pengadaan catridge pada penganggaran tidak sesuai kebutuhan serta adanya efisiensi pada bagian perjalanan dinas.

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- (1) Sub kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 93.884.000,00 terealisasi sebesar Rp 58.760.000,00 sebesar 62,59% dengan indikator sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) target sebesar 1 organisasi dan terealisasi 1 organisasi capaian 100%. Capaian keuangan kurang dari 75%, karena petunjuk teknis pusat dan daerah yang berbeda menyebabkan kegiatan belanja jasa narasumber tidak dapat direalisasikan.
- (2) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp. 8.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,00 capaian sebesar 44,44% dengan indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (laporan) target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan capaian 100%. Capaian keuangan kurang dari 75%, karena petunjuk teknis pusat dan daerah yang berbeda menyebabkan kegiatan belanja jasa narasumber tidak dapat direalisasikan.
- (3) Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran sebesar Rp. 250.181.000,00 terealisasi sebesar Rp 148.352.713,00 sebesar 59,30 % dengan indikator sub kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

(orang) target sebesar 329,00 orang dan terealisasi 325,00 orang capaian 98,78 %. Capaian keuangan kurang dari 75% karena kurangnya akseptor MKJP, adanya pilihan lain PUS memilih non MKJP serta pilihan KB Pria tidak ada sehingga biaya pengganti bekerja juga tidak bisa terealisasi.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- (1) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan anggaran sebesar Rp. 7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.155.000,00 sebesar 53,27 dengan indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (laporan) target sebesar 1 laporan dan terealisasi 1 laporan capaian 100%. Capaian keuangan tidak mencapai 75% karena terlambatnya regulasi PPTK menghambat pengambilan keputusan.
- (2) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda dengan anggaran sebesar Rp 300.322.900,00 terealisasi sebesar Rp 224.349.139,00 sebesar 74,70 % dengan indikator sub kegiatan Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk (kelompok) target sebanyak 140 kelompok terealisasi 140 kelompok capaian 100%. Capaian keuangan tidak mencapai 75% karena terlambatnya regulasi PPTK menghambat pengambilan keputusan.

Dari permasalahan yang telah muncul seperti dipaparkan diatas akan dilakukan solusi pemecahan masalahnya sebagai berikut :

1. Merancang anggaran yang dibutuhkan agar tepat guna dan tepat sasaran sesuai

dengan perencanaan

2. Melakukan koordinasi , penganggaran yang cukup dan pendampingan didalam penyusunan anggaran yang kekurangan.

SASARAN II : Terwujudnya Kemandirian Desa

Sasaran yang kedua yaitu terwujudnya kemandirian desa. Indikator kinerja Utamanya sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.6
Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Kemandirian Desa

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	desa	53	53	100%

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Dalam hal ini jumlah desa di Kabupaten Klungkung yaitu 53 desa dengan 6 kelurahan. Jumlah desa dengan status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun yaitu 53 desa, telah terealisasi 100%. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri 53 desa terealisasi 53 desa dengan capaian sebesar 100 %. Hasil pengukuran kriteria tersebut sesuai dengan IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, 53 desa yang ada di Kabupaten Klungkung telah seluruhnya berstatus Desa Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat perbandingan Tingkat Capaian Indeks Desa Mandiri (IDM) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dengan Kabupaten lainnya,

dimana data terkait masih menggunakan data tahun sebelumnya dengan perbandingannya berdasarkan persentase pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1. Perbandingan IDM
Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Lainnya Tahun 2024**

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Status IDM		Persentase (%)
			MAJU	MANDIRI	
1	Karangasem	75	22	53	70,1
2	Bangli	68	18	50	73,5
3	Buleleng	129	38	91	70,5
4	Klungkung	53	0	53	100
5	Gianyar	56	0	56	100
6	Badung	46	0	46	100
7	Tabanan	114	0	114	100

Berdasarkan data diatas, yang menjadi indikator penilaian desa mandiri menurut status desa mandiri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan turunannya (IDM) yaitu desa dengan nilai IDM > 0,8155, yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi tinggi. Indikator utamanya mencakup ketersediaan layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan desa sebagai nilai dari 6 dimensi Indeks Desa Tahun 2025.

3.1.7 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Capaian Kinerja tiga tahun terakhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sesuai sasaran II sebagaimana tabel Berikut :

**Tabel 3.1.7.1
Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir**

			2023	2024	2025
--	--	--	------	------	------

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	15	50	100%	20	53	100%	53	53	100%

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Dilihat dari pencapaian kinerja 3 (tiga) tahun (2023-2025) bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Desa yang termasuk kategori status mandiri yaitu sebanyak 53 desa dimana seluruh desa yang ada di Kabupaten Klungkung telah masuk kategori desa mandiri.

Hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah desa untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya serta dapat mendorong masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

3.1.8 Capaian Kinerja Target Renstra

Tabel 3.1.8.1
Capaian Kinerja Renstra SKPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi S.D Tahun 2025	Capaian
	Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	30 desa	53 desa	>100%

Sumber: DPMDPPKB Tahun 2025

Capaian target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam tiga tahun ini sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu jumlah desa dengan status desa mandiri.

3.1.9 Analisis Tingkat Efisiensi Sasaran II Terwujudnya Kemandirian Desa

No	Kegiatan	Indikator Sasaran/program/kegiatan/subkegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
I										
1	Terwujudnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	53	82.81	0.640	53	100	0.53	0.208	Efisien
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek reformasi birikrasi perangkat daerah (poin)	69	85.17	0.810	69	100	0.69	0.174	Efisien
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	hasil evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanj	100	98.18	1.019	100	100	1	0.019	Efisien

		uti (persen)								
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah (dokumen)	9	98.18	0.092	9	100	0.09	0.019	Efisien
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	100	85.62	1.168	100	100	1	0.168	Efisien

6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	30	85.61	0.351	30	100	0.3	0.168	Efisien
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (bulan)	12	97.35	0.123	12	100	0.12	0.027	Efisien
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersusunnya laporan disiplin aparatur (laporan)	12	84.22	0.143	12	100	0.12	0.187	Efisien
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	2	84.22	0.024	2	100	0.02	0.187	Efisien
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum (persen)	98	28.96	3.384	100	100	1	2.384	Efisien
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	75.76	0.0132	1	100	0.01	0.320	Efisien
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan jasa penunjang (persen)	100	75.94	1.317	100	100	1	0.317	Efisien

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	65.24	0.015	1	100	0.01	0.533	Efisien
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	78.29	0.013	1	100	0.01	0.277	Efisien
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (persen)	100	84.84	1.179	100	100	1	0.179	Efisien
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	13	84.55	0.154	13	100	0.13	0.183	Efisien
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	13	87.95	0.148	13	100	0.13	0.137	Efisien

18	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa sesuai ketentuan (persen)	100	62.34	1.604	100	100	1	0.604	Efisien
19	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan (persen)	85	62.34	1.364	85	100	0.85	0.604	Efisien
20	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (dokumen)	1	27.56	0.036	1	100	0.01	2.629	Efisien
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (dokumen)	1	95.44	0.0105	1	100	0.01	0.048	Efisien
22	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (laporan)	1	9.93	0.101	1	100	0.01	9.071	Efisien
23	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)	1	72.34	0.014	1	100	0.01	0.382	Efisien
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase LPD sehat, BUMDes maju (persen)	60	93.71	0.640	60	100	0.6	0.0672	Efisien

33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik (desa)	1	93.71	0.011	1	100	0.01	0.067	Efisien
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	1	91.84	0.011	1	100	0.01	0.089	Efisien
35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (dokumen)	1	94.25	0.011	1	100	0.01	0.061	Efisien
36	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	1	96.62	0.010	1	100	0.01	0.035	Efisien

		Keluarga (dokumen)								
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data: Sirenbangda-CIK Perubahan Desember 2025

3.1.10 Realisasi Anggaran Sasaran II Terwujudnya Kemandirian Desa

No	Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Kemandirian Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,109,680,168.00	6,907,175,360.00	1,202,504,808.00	85.17	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,887,900.00	6,762,780.00	125,120.00	98.18	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,887,900.00	6,762,780.00	125,120.00	98.18	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,626,249,198.00	6,529,687,913.00	1,096,561,285.00	85.62	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,620,826,218.00	6,524,408,913.00	1,096,417,305.00	85.61	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,422,980.00	5,279,000.00	143,980.00	97.35	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,767,380.00	1,488,500.00	278,880.00	84.22	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,767,380.00	1,488,500.00	278,880.00	84.22	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,590,000.00	750,000.00	1,840,000.00	28.96	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	990,000.00	750,000.00	240,000.00	75.76	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360,988,470.00	274,145,334.00	86,843,136.00	75.94	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,890,000.00	42,333,262.00	22,556,738.00	65.24	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296,098,470.00	231,812,072.00	64,286,398.00	78.29	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,197,220.00	94,340,833.00	16,856,387.00	84.84	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101,657,220.00	85,950,833.00	15,706,387.00	84.55	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,540,000.00	8,390,000.00	1,150,000.00	87.95	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,847,565,896.00	1,151,763,596.00	695,802,300.00	62.34	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,847,565,896.00	1,151,763,596.00	695,802,300.00	62.34	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7,618,600.00	2,100,000.00	5,518,600.00	27.56	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	966,460,750.00	922,423,376.00	44,037,374.00	95.44	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	634,919,500.00	63,072,000.00	571,847,500.00	9.93	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	226,937,046.00	164,168,220.00	62,768,826.00	72.34	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,725,844,558.00	1,617,327,526.00	108,517,032.00	93.71	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,725,844,558.00	1,617,327,526.00	108,517,032.00	93.71	

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.863.455.102,00	1.786.198.170,00	77.256.932,00	91.84	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1,038,034,678.00	953,284,854.00	84,749,824.00	91.84	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	21,999,820.00	20,734,000.00	1,265,820.00	94.25	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	665,810,060.00	643,308,672.00	22,501,388.00	96.62	

Sumber data: Sirembangda-CIK Perubahan Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari total anggaran yang dikelola Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 11.685.090.622,00 terealisasi sebesar Rp 9.676.266.482,00 atau sebesar 82,81%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) target sebanyak 73 indeks, terealisasi sebanyak 76,8 indeks dengan capaian indikator sasaran sebesar 105,2 % dan Terwujudnya Kemandirian Desa dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah Desa Dengan Status Desa Mandiri target sebanyak 53 desa terealisasi 53 desa capaian indikator sasaran yaitu 100%.
2. Serapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025 mencapai 84,21% yaitu dari total anggaran sebesar Rp. 14.770.009.808,00 dengan realisasinya Rp. 12.438.021.605,00.
3. Berdasarkan hasil analisis efisiensi, pencapaian kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya sudah dilaksanakan secara efisien.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana diantaranya:

1. Penyuluhan KB dan KIE pada PUS belum optimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Karena KIE belum spesifik sesuai kebutuhan serta karakteristik PUS sehingga sulit mengubah perilaku, rendahnya keterlibatan pria/suami serta keterbatasan jumlah dan kinerja penyuluh KB di lapangan.
2. Dalam pelayanan MKJP, rendahnya minat akseptor KB terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, MOW, dan MOP, dipengaruhi oleh faktor multi-sektoral, baik dari sisi akseptor (pasien) maupun penyedia layanan utamanya karena kurangnya informasi dan pengetahuan terkait penggunaan MKJP, takut terhadap efek negatif yang ditimbulkan oleh KB MKJP serta penggunaan kontrasepsi jangka pendek dianggap lebih nyaman dan praktis oleh akseptor

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diantaranya:

1. Minimnya pemahaman SDM aparatur desa karena kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan kurang maksimal . Hanya dilakukan di masing-masing desa sehingga tidak adanya tenaga profesional yang memberikan pelatihan kepada perangkat desa.
2. Beberapa kegiatan belum berjalan optimal akibat regulasi peraturan yang terlambat. Dalam hal ini pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang seharusnya dilakukan di Tahun 2025, namun karena regulasi dari pusat terlambat menyebabkan kegiatan tersebut harus diundur untuk dilaksanakan ditahun berikutnya.
3. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal akibat terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Sehingga program yang membutuhkan keterlibatan banyak stakeholder belum dapat terlaksana.

4.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari permasalahan tersebut diatas serta langkah-langkah yang dilakukan diantaranya:

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	Pelaksana	Waktu	Keterangan
1	Penyuluhan KB dan KIE pada PUS belum optimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Karena KIE belum spesifik sesuai kebutuhan serta karakteristik PUS sehingga sulit mengubah perilaku, rendahnya keterlibatan pria/suami serta keterbatasan jumlah dan kinerja penyuluh KB di lapangan.	Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada akseptor KB melalui PLKB dan tenaga medis pada fasilitas pelayanan kesehatan	Bidang PPKB	TWI,II,III,IV Tahun 2026	Dengan memaksimalkan tenaga kesehatan setempat dapat membantu mengoptimalkan penyuluhan KB dan KIE kepada masyarakat dan PUS
2	Dalam pelayanan MKJP, rendahnya minat akseptor KB terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, MOW, dan MOP, dipengaruhi oleh faktor multi-sektoral, baik dari sisi akseptor (pasien) maupun penyedia layanan utamanya karena kurangnya informasi dan pengetahuan terkait penggunaan MKJP, takut terhadap efek	Melakukan KIE kepada PUS dengan lebih intensif	Bidang PPKB	TWI,II,III,IV Tahun 2026	Diharapkan dapat menambah wawasan akseptor KB dan meningkatkan penggunaan MKJP

	negatif yang ditimbulkan oleh KB MKJP serta penggunaan kontrasepsi jangka pendek dianggap lebih nyaman dan praktis oleh akseptor				
3	Minimnya pemahaman SDM aparatur desa karena kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan kurang maksimal . Hanya dilakukan di masing-masing desa sehingga tidak adanya tenaga profesional yang memberikan pelatihan kepada perangkat desa.	Mengusulkan kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk semua perangkat desa secara serentak di tahun 2027, untuk dilaksanakan di kabupaten dengan narasumber yang lebih berkompeten di bidangnya	Bidang Pemdes	TW IV Tahun 2027	Dapat dimasukkan kedalam perencanaan anggaran untuk terlaksananya kegiatan sesuai ketentuan.
4	Beberapa kegiatan belum berjalan optimal akibat regulasi peraturan yang terlambat. Dalam hal ini pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang seharusnya dilakukan di Tahun 2025, namun karena regulasi dari pusat terlambat menyebabkan kegiatan tersebut harus diundur untuk dilaksanakan ditahun berikutnya	Berkoordinasi secara intensif dengan PMD Dukcapil Provinsi Bali terkait petunjuk teknis pelaksanaan regulasi.	Bidang Pemdes	TWI,II,III,IV Tahun 2026	Dapat dimasukkan kedalam perencanaan anggaran untuk terlaksananya kegiatan sesuai ketentuan.
5	Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal akibat terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Sehingga program yang membutuhkan keterlibatan banyak stakeholder belum dapat terlaksana.	Mengupayakan perencanaan dan target pelaksanaan kegiatan di tahun 2027 dengan tambahan alokasi dana.	Bidang Pemdes	TWI,II,III,IV Tahun 2027	Dapat dimasukkan kedalam perencanaan anggaran untuk terlaksananya kegiatan sesuai ketentuan.

Semarapura, 02 Januari 2026
**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klungkung**



Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda
NIP. 19680724 198903 1 006